



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 85 TAHUN 2017**

TENTANG

**KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DAN PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembuatan dan penerimaan arsip serta penyelenggaraan dan penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 116 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga klasifikasi arsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam pembuatan dan penerimaan arsip serta penyelenggaraan dan penataan kearsipan di lingkungan Pencipta Arsip, perlu mengatur kembali klasifikasi arsip dalam penyelenggaraan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan perubahan lingkup klasifikasi arsip yang juga mengakomodir pemerintah desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DAN PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

- dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
 8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
 10. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
 11. Penataan Kearsipan adalah cara untuk mengatur dan menata Arsip dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat berkas yang bertujuan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan memudahkan dalam mencari informasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan klasifikasi arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 116 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 116 Seri E Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

**Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Desember 2017**

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

**Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 85 SERI E NOMOR 66**



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 85 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DAN PEMERINTAH DESA**

**KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DAN PEMERINTAH DESA**

I. UMUM

1. Klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Klasifikasi dirinci secara dokumen, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut:

145

		100: Pokok Masalah tentang PEMERINTAHAN
		140: Sub Masalah tentang PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
		145: Sub-Sub Masalah tentang Administrasi Desa dan Kelurahan

4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah fasilitatif dan substantif Perangkat Daerah, adalah:

000 UMUM
010 URUSAN DALAM
020 KEKAYAAN DAERAH
030 PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI
040 PERENCANAAN DAN EVALUASI
050 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
060 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
070 KONFERENSI/RAPAT KOORDINASI
080 PERJALANAN DINAS
100 PEMERINTAHAN
110 PEMERINTAHAN PUSAT
120 PEMERINTAHAN PROVINSI
130 PEMERINTAHAN KABUPATEN
140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
150 DPRD KABUPATEN/KOTA
160 HUKUM
170 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 POLITIK
210 KEPARTAIAN
220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
230 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
240 ORGANISASI WANITA
250 PEMILU, PILKADA
260 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
310 PERTAHANAN
320 KEAMANAN
330 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
340 KEJAHATAN
350 KECELAKAAN
360 BENCANA
370 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
380 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
420 PENDIDIKAN
427 KEOLAHRAGAAN
428 KEPEMUDAAN
430 KEBUDAYAAN
440 KESEHATAN
445 RSU, RSJ, RS KHUSUS
450 AGAMA
460 SOSIAL
470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
475 TRANSMIGRASI
476 KELUARGA BERENCANA
480 MEDIA MASSA
500 PEREKONOMIAN
510 PERDAGANGAN
513 KOPERASI DAN UMKM
520 PERTANIAN
522 PERIKANAN DAN KELAUTAN
523 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
524 PERKEBUNAN
525 KETAHANAN PANGAN
530 PERINDUSTRIAN
540 PERHUBUNGAN
550 TENAGA KERJA
560 PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
570 PERBANKAN MONETER
580 AGRARIA
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
610 PENGAIRAN
620 JALAN
630 JEMBATAN
640 BANGUNAN
650 TATA RUANG KOTA
660 TATA LINGKUNGAN

700 PENGAWASAN
 710 BIDANG PEMERINTAHAN
 720 BIDANG POLITIK
 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
 750 BIDANG PEREKONOMIAN
 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
 790 BIDANG KEUANGAN
 800 KEPEGAWAIAN
 810 PENGADAAN
 820 MUTASI
 830 KEDUDUKAN
 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
 850 CUTI
 860 PENILAIAN
 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
 880 PEMBERHENTIAN
 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
 900 KEUANGAN
 910 ANGGARAN
 920 AKUNTANSI
 930 PERBENDAHARAAN
 940 PENGELOLAAN KAS DAERAH
 950 PENDAPATAN

II. RINCIAN

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Provinsi
001.4	Kabupaten
002	Tanda kehormatan/penghargaan (khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Parasamya Purna Karya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya/Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Raya Pahlawan, Hari Lahirnya Pancasila dll)
003.2	Hari Raya Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun (Hari Jadi Provinsi/Kabupaten/Kota dll)
004	Ucapan
004.1	Ucapan Terima kasih
004.2	Ucapan Selamat
004.3	Ucapan Mohon diri

KODE	KLASIFIKASI
004.4	Ucapan Bela sungkawa
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006,1	Aparatur Sipil Negara (ASN)
006.2	Pejabat lainnya
010	URUSAN DALAM
011	Gedung kantor
011.1	Listrik (termasuk Genset)
011.2	Air Minum
011.3	Telepon
011.4	Internet
011.5	Kebersihan Kantor
012	Rumah Dinas/ Bangunan
012.1	Listrik (termasuk Genset)
012.2	Air Minum
012.3	Telepon
012.4	Internet
012.5	Kebersihan
013	Pengurusan Kendaraan Dinas
014	Protokol
014.1	Upacara Bendera
014.2	Tata Tempat termasuk pemasangan Gambar Pejabat Negara
014.3	Audiensi/menghadap pimpinan
014.4	Penerimaan Tamu
015	Peminjaman sarana prasarana kantor
016	Pinjam Alun-alun
017	Kerjasama
020	Kekayaan Daerah
021	Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
022	Pengadaan Barang /Jasa
023	Distribusi/Pemindahtanganan
024	Pemeliharaan
025	Penghapusan
026	Pelaporan (termasuk KIR, KIB, Stock Opname, Neraca, Penetapan Status BMD dll)
027	Sensus Barang Milik Daerah
030	PERPUSTAKAAN/ DOKUMEN/ KEARSIPAN/SANDI
031	Perpustakaan
031.1	Pameran Bahan Perpustakaan
031.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
031.3	Sirkulasi / layanan
031.31	Keanggotaan
031.32	Peminjaman dan pengembalian
031.4	Deposit
031.5	Pemeliharaan, Pelestarian/alih media
031.6	Pembinaan Perpustakaan (Termasuk Bantuan buku. Rak)
031.7	Publikasi/Promosi Perpustakaan (termasuk Pengembangan Minat Baca)
031.8	Kemitraan, Forum Perpustakaan,

KODE	KLASIFIKASI
035	Kearsipan
035.1	Kebijakan
035.2	Pembinaan Kearsipan
035.21	Akreditasi Kearsipan
035.22	Sertifikasi Arsiparis
035.23	Bina Arsiparis
035.24	Bimbingan dan Konsultasi
035.25	Supervisi dan Evaluasi
035.26	Fasilitasi Kearsipan
035.3	Pengelolaan Arsip
035.31	Pengelolaan Arsip Dinamis
35.311	Penciptaan Arsip
035.312	Penggunaan Arsip
035.313	Pemeliharaan Arsip
035.314	Autentikasi Arsip Dinamis
035.315	Penyusutan Arsip
035.4	Pengelolaan Arsip Statis
035.41	Akuisisi
035.42	Sejarah Lisan
035.43	Daftar Pencarian Arsip Statis
035.44	Pengolahan
035.45	Preservasi
035.46	Autentikasi Arsip Statis
035.47	Akses Arsip Statis
035.48	Jasa Kearsipan
040	PERENCANAAN DAN EVALUASI meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbang-pus antar Kementerian, Musrenbangnas)
040.1	RPJM
040.11	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
040.12	RENSTRA (Rencana Strategi)
040.13	RENSTRA Perangkat Daerah
040.2	Program Daerah
040.21	Rencana Kerja PD
040.22	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
040.23	RKO (Rencana Kerja Operasional)
040.25	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
041	Laporan berkala
042	Evaluasi Rencana Strategis
042.1	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
042.2	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
050	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN
051	Organisasi
051.1	Organisasi Pemerintah
051.11	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
051.12	Tata Tertip Kantor
051.2	Organisasi Badan Non Pemerintah
051.3	Organisasi Badan Internasional

KODE	KLASIFIKASI
051.4	Organisasi Semi Pemerintah
051.5	Pengukuran/ penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
052	Ketatalaksanaan
052.1	Tata Naskah Dinas
052.2	Alamat Kantor dan Pejabat
052.3	Ketentuan pakaian dinas dan atribut
052.4	Evaluasi dan Laporan ketatalaksanaan
052.5	Analisis Jabatan (Termasuk Pengukuran atau Penilaian Beban Kerja Jabatan Struktural/Fungsional dan Uraian Jabatan)
053	Pelayanan Publik
053.1	Standar Pelayanan (Termasuk Standar Operasional Prosedur)
053.2	Inovasi Pelayanan
053.3	Pengaduan Pelayanan
053.4	Survei Kepuasan Masyarakat
060	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
061	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
062	Pengembangan
062.1	Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
062.2	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi klaster Kab/ Kota, desa inovatif)
062.3	Pameran produk inovasi/ Ristek
062.4	Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
063	Kajian
063.1	Kajian strategis/ diskusi/ Forum Group Discussion (FGD)
063.2	Seminar / Diseminasi/ sosialisasi hasil penelitian
063.3	Workshop / Lokakarya
063.4	Rapat Koordinasi/ Rapat Teknis
064	Kerjasama Penelitian
064.1	Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah
064.2	Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta
064.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
065	Publikasi Ilmiah
070	KONFERENSI/ RAPAT KOORDINASI
071	Gubernur
072	Bupati
073	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan OPD)
074	Instansi lainnya (di luar Kemendagri)
075	International di dalam negeri
076	Konferensi Perangkat Desa termasuk Sekretaris Desa
080	PERJALANAN DINAS
081	Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah
082	Perjalanan Menteri Ke Daerah
083	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)

KODE	KLASIFIKASI
084	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
085	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
086	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
087	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100	PEMERINTAHAN
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
111.1	Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
111.2	Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Sumpah dan serah terima jabatan.
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshuffle
113.2	Penunjukan Menteri ad Interim
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, (lihat 500.1)
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementerian lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi Daerah
119	Kerjasama antar Kementerian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahkan kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kerjasama antar Provinsi/ Daerah, dan Luar Negeri
121	Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
122	Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi: Muspida
125	Pembentukan/ Pemekaran
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan ibukota Propinsi
126	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
130	PEMERINTAH KABUPATEN

KODE	KLASIFIKASI
131	Bupati/ Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati/ Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah (FKPD)
135	Kebijakan pemerintahan Kabupaten
135.1	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
135.2	Laporan kinerja Pertanggung jawaban Bupati LKPJ)
135.3	Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ)
136	Koordinasi (ditanyakan bisa overlap dengan index keg)
136.1	Organisasi Perangkat Daerah OPD)
136.2	Instansi Vertikal
136.3	Kerjasama antar Provinsi/ Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
137	Kewilayahan
137.1	Pembentukan Daerah Otonom
137.2	Pembentukan/Pembagian Wilayah
137.3	Perubahan Batas Wilayah
137.4	Pemekaran Wilayah
137.5	Permasalahan Batas Wilayah
137.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten / Kota
137.7	Pemberian dan penggantian nama kota , daerah , jalan
138	Penyerahan Urusan
139	Monografi termasuk profil Daerah, Profil OPD dan Toponimi
140	PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN
141	Pamong Desa meliputi: pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan, dsb
141.1	Penghasilan dan tunjangan
141.2	Kesejahteraan selain penghasilan dan tunjangan (hak cuti, jaminan kesehatan, penerimaan lainnya)
141.3	Perlindungan hukum terhadap tupoksi
142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
142.1	RPJMDesa
142.2	RKPDesa
143	Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok, tanah kas desa, dll
144	Lembaga Tingkat Desa: BPD, LPMD, LKD, dll
145	Administrasi Desa/ Kelurahan :
145.1	Profil Desa, Monografi, dll
145.2	LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)
145.3	Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Keterangan Boro Kerja, dll

KODE	KLASIFIKASI
146	Kewilayahan
146.1	Pembentukan Desa/ Kelurahan
146.2	Pemekaran Desa/ Kelurahan
146.3	Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan
146.4	Perubahan nama Desa/ Kelurahan
146.5	Permasalahan Batas Desa/ Kelurahan
146.6	Penyatuan Desa/ Kelurahan
146.7	Penghapusan Desa/ Kelurahan
147	Dusun, RT, RW
148	Kader Desa
150	DPRD KABUPATEN/ KOTA
151	Keanggotaan
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
151.3	Pelanggaran
151.4	Pemberhentian AntarWaktu
151.41	Meninggal Dunia
151.42	Mengundurkan Diri
151.43	Diberhentikan
151.5	Alat Kelengkapan Dewan
151.51	Pimpinan
151.52	Badan Musyawarah
151.53	Komisi
151.54	Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
151.55	Badan Anggaran
151.56	Badan Kehormatan
151.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
152	Persidangan
152.1	Rapat-Rapat
152.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
152.12	Rapat Pimpinan DPRD
152.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Legislasi, Rapat Badan Kehormatan
152.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
152.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
152.16	Rapat Fraksi
152.2	Pengaduan Masyarakat
152.3	Fraksi
152.4	Tata Tertib
152.5	Kode Etik
152.6	Reses
152.7	Koordinasi/ konsultasi/ studi banding/ Kunjungan Kerja
152.8	Peningkatan Kapasitas
152.9	Tenaga ahli
153	Kesejahteraan
153.1	Keuangan
153.2	Penghargaan
154	Hak

KODE	KLASIFIKASI
160	HUKUM
160.1	Konstitusi
160.11	Dasar Negara
160.12	Undang Undang Dasar
160.13	Undang-Undang
160.14	Peraturan Pemerintah
160.15	Keppres/ Perpres/ Inpres
160.16	Kepmen/ Permen/ Inmen
160.17	Perundangan Tingkat Provinsi meliputi: Perda, Kegub/ Pergub/ Ingub
160.18	Perundangan Tingkat Kabupaten meliputi: Perda, KepBup, PerBup
160.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa
160.2	Tap MPR
160.3	Konvensi
161	Perdata
161.1	Tanah
161.2	Rumah
161.3	Utang/ Piutang
161.31	Gadai
161.32	Hipotik
161.4	Notariat
162	Pidana
162.1	Tindak Pidana Umum
162.2	Tindak Pidana Khusus
163	Peradilan
164	Hukum Internasional
165	Imigrasi
166	Kepenjaraan
166.1	Registrasi narapidana
166.2	Pembinaan narapidana
166.3	Pembebasan narapidana
166.4	Tahanan titipan
167	Kejaksaan
167.1	Penuntutan Umum
167.2	Penuntutan Khusus
168	Hukum Adat
170	HUBUNGAN LUAR NEGERI
171	Kerjasama Bilateral
172	Kerjasama Multilateral
200	POLITIK
201	Pembinaan Politik Dalam Negeri
202	Pembinaan Politik Luar Negeri
210	KEPARTAIAN
211	Partai Politik
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
211.2	Program Kerja, data kegiatan Partai Politik
211.3	Pembinaan Partai Politik

KODE	KLASIFIKASI
211.4	Hasil Munas/ Musda Partai Politik
211.5	Struktur/ Kepengurusan, pengkaderan dan Keanggotaan Partai Politik
211.6	Data inventaris dan keuangan Partai Politik
212	Partai/ Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan pembubaran partai/ organisasi terlarang
212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai/ organisasi terlarang
212.3	Ijin Meninggalkan tempat/ domisili bagi anggota partai/ organisasi terlarang
212.4	Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
213	Forum Komunikasi Lintas antar Partai Politik
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Pembentukan organisasi
221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
221.3	Program Kerja organisasi
221.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten/ Kota
221.5	Musdes/ Kel
222	Pembinaan organisasi
222.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
222.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
223	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
224	Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing
230	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
231	Pembentukan organisasi
231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
231.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
231.3	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
231.4	Program kerja organisasi
231.5	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten/ Kota
232	Pembinaan organisasi
240	ORGANISASI WANITA
241	Pembentukan organisasi
241.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
241.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
241.3	Program kerja organisasi
241.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten/ Kota
242	Pembinaan organisasi
242.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
242.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
250	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
251	Pencalonan
252	Nomor Urut/ Tanda Gambar
253	Kampanye

KODE	KLASIFIKASI
253.1	Dana Kampanye
254	Petugas Pemilu
255	Pemilih/ Daftar Pemilih
256	Sarana (termasuk Surat Suara, Kotak Suara)
257	Pemungutan Suara/ Penghitungan Suara
258	Hasil Pemilu
258.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
258.2	Penetapan Pemenang pilkada
259	KPU/ KPUD
260	PENGAWASAN PEMILU/ PILKADA
261	Pemantauan
262	Pelanggaran
263	Sengketa
264	Panwaslu
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ ketertiban umum (termasuk ketenteraman masyarakat)
301	Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (termasuk ketenteraman masyarakat)
302	Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum termasuk ketertiban masyarakat
303	Penegakan Pelaksanaan Perda dan Perbup
304	Pembinaan/ Penyuluhan pelanggaran Perda dan Perbup
305	Patroli Wilayah
306	Laporan kunjungan VIP, WIP, Tamu Asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
320	KEAMANAN
321	Polisi Pamong Praja
322	Huru-hara/ Demonstrasi/ unjuk rasa
323	Senjata Api/ Tajam
324	Bahan Peledak
325	Perjudian
326	Surat-surat kaleng
327	Pengaduan Masyarakat
328	Himbauan atau Larangan

KODE	KLASIFIKASI
330	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
330.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
331	Pembinaan dan Diklat
331.1	Pengangkatan/ pemberhentian anggota Linmas
331.2	Pendidikan/latihan Linmas
331.3	Pelatihan PAM Swakarsa
331.4	Pendidikan/ latihan MENWA
332	Pengerahan dan pengendalian Linmas
333	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
333.1	Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
333.2	Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
333.3	Santunan uang duka bagi anggota Linmas
333.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
334	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
334.1	Linmas Lanjut Usia
340	KEJAHATAN
341	Makar/ Pemberontakan/Terrorisme
342	Pembunuhan
343	Penganiayaan/ Pencurian/ Perampasan
344	Subversi/ Penyeludupan/ Narkotika
345	Penipuan dan Pemalsuan
346	Korupsi/ penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan
347	Kekerasan pada perempuan dan anak (termasuk KDRT)
347.1	Pelaporan
347.2	Penanganan korban
348	Kenakalan
349	Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, bunuh diri dll)
350	KECELAKAAN
351	Darat Termasuk Investigasi
352	Udara Termasuk Investigasi
353	Laut Termasuk Investigasi
360	BENCANA
361	Pemetaan Daerah Bencana
362	Kawasan Rawan Bencana
363	Jenis Bencana
366	Kesiapsiagaan Bencana (Meliputi : Pelatihan, Posko Bencana)
367	Koordinasi/Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Termasuk Pencegahan Bencana
370	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
371	Perencanaan
371.1	Perencanaan teknis
371.2	Rekomendasi
372	Bantuan Bencana
373	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
374	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
375	Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)
376	Kunjungan lapangan
377	Relawan

KODE	KLASIFIKASI
378	Laporan Bencana
380	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
381	Instansi pemerintah Pusat
382	Instansi pemerintah di daerah
383	Lembaga International
384	Lembaga non pemerintah
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
411	Musrenbangdes
412	Gotong Royong
412.1	Swadaya gotong royong
412.2	Latihan Kerja Masyarakat
412.3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
412.4	Penyuluhan Masyarakat Desa
412.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
413	Perekonomian Desa/Kelurahan
413.1	Produksi Desa
413.2	Pemasaran Produksi
413.3	BUMDesa
414	Sarana dan Prasarana Desa/ kelurahan
414.1	Pemukiman penduduk
414.2	Perbaikan kampung
414.3	Teknologi Tepat Guna
415	Pengembangan Desa / kelurahan
415,1	Pembinaan
415.2	Perlombaan
416	Koordinasi
417	Kerjasama
420	PENDIDIKAN
420.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk pendidikan (Termasuk Kejar paket A,B,C, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Anak Putus Sekolah
420.2	Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
421	Sekolah (termasuk akreditasi, Regrouping, Perijinan Pendirian, Ijin Operasional Lembaga)
421.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.6	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
422	Pengembangan Siswa diantaranya Orientasi Siswa, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba,(LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar,.

KODE	KLASIFIKASI
423	Dies Natalis, Lustrum, reuni dll
424	Administrasi Sekolah
424.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK
424.2	Kalender Pendidikan
424.3	Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
424.4	Bantuan Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Indonesia Pintar (PIP)
424.5	Ijazah
424.6	Sertifikat
425	Metode Belajar
425.1	Kurikulum
425.2	Karya Tulis, Karya Ilmiah
425.3	Ujian
425.4	E-Learning
425.5	Kuliah
425.6	Ceramah, Simposium, Seminar
425.7	Diskusi
425.8	Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL
425.9	Sistem Informasi Pendidikan
426	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
426.1	Pertukaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke luar negeri
427	KEOLAHRAGAAN
427.1	Pembinaan Keolahragaan
427.11	Olah Raga Prestasi (Porprov, PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade, dll)
427.12	Olah Raga Pendidikan (POPDA, Porseni dll)
427.13	Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional, dll)
427.14	Iptek dan Industri Olah Raga
427.2	Kemitraan Olah Raga
428	KEPEMUDAAN
428.1	Pertukaran Pemuda
427.2	Paskibraka
428.3	Pemberdayaan Pemuda
428.4	Kemitraan Pemuda
429	Kepramukaan/ Kepanduan
430	KEBUDAYAAN
430.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
431	Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis, Perfilman dll)
432	Kepurbakalaan
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
440	KESEHATAN
440.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan dan pelayanan Kesehatan

KODE	KLASIFIKASI
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, dsb
441.8	Kesehatan keluarga (termasuk kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja)
441.9	Jaminan Kesehatan
442	Obat-obatan
442.1	Permohonan Pembelian Obat
442.2	Klaim
442.3	Pengawasan Obat
442.4	Penghapusan Obat
443	Pemberantasan dan Pencegahan Penvakit
443.1	Pencegahan Penyakit
443.11	Promosi Kesehatan
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	T.B.C
443.25	Kholera, Diare
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya
443.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
443.31	Malaria
443.32	Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptospirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.41	A. Pektoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks
443.47	Pemberantasan. Dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae
443.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar
443.49	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Paru, dan penyakit lainnya
443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi

KODE	KLASIFIKASI
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene sanitasi
443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasaboga
443.62	Sarana air minum
443.63	Pestisida, insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga
443.66	Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll
443.67	Higiene sanitasi CA. Mammae
443.68	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.69	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian Khusus
443.71	Dekompensasiokordosis (serangan jantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443.74	PPOM
443.75	Kecelakaan lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk
444.3	Keracunan makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Gondok endemik (GAKI)
445	RSU, RSJ, RS Khusus
445.1	Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien,visum)
445.11	Rawat Inap
445.12	Rawat Jalan
445.13	IGD
445.14	IBS
445.15	ICU
445.16	MCU (Medical Check Up)
445.2	Penunjang Medis
445.21	Farmasi
445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Darah Rurnah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD/ Laundry
445.3	Keperawatan

KODE	KLASIFIKASI
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditasi
445.62	ISO
445.63	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	Promosi layanan kesehatan
445.8	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.24	TKHD (Tenaga Kesehatan Haji Daerah)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan/Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis
446.5	Pendidikan di bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi
447.2	Perizinan berkaitan dengan alat kesehatan
448	Pengobatan Alternatif
448.1	Pijat
448.2	Akupunktur
448.3	Jamu dan herbal
448.4	Dukun
449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan (termasuk polindes dan forum Kesehatan Desa)
449.1	Puskesmas dan Puskesmas Keliling
449.2	Klinik
449.3	Public Safety Center (PSC)
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
450	AGAMA
450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
450.2	Bantuan dibidang keagamaan (Bantuan Guru Ngaji)
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh, Baznas
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji (Petugas Pendamping Haji Daerah)
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholah) Dewan Masjid Indonesia
451.3	Tokoh Agama, Rohaniawan

KODE	KLASIFIKASI
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah, MTs, MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah, MI
451.44	Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
451.45	Dakwah (Pengajian, MTQ)
451.5	Wakaf
451.6	Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah, (Gereja dll)
452.3	Tokoh agama, rohaniawan
452.4	Pendidikan Agama
452.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik
453	Khatolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah, (Gereja, Kaple dll)
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Pendidikan Agama
453.5	Organisasi Gerejani
453.6	Organisasi keagamaan bukan politik
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah ibadah, (Pura dll)
454.3	Tokoh agama, rohaniawan
454.4	Pendidikan Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah, (Candi, Vihara dll)
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Pendidikan Agama Budha
455.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik
456	Kong Hu Cu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadah, (Klenteng dll)
456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
456.4	Pendidikan Agama Kong Hu Cu
456.5	Organisasi keagamaan bukan politik
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penyandang Cacat
461.1	Cacat Ganda
461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
462.2	Pengemis

KODE	KLASIFIKASI
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak Nakal
462.5	Tuna Wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Kesejahteraan Anak
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
464.2	Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan.
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut usia
465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll
466	Sumbangan Sosial
466.1	Korban Bencana
466.11	Jaminan Sosial
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar, dsb
466.3	Panti Asuhan
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus, Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Kartu identitas anak
471.13	Kartu tanda penduduk
471.14	Kartu Keluarga
471.2	Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan penduduk WNI
471.22	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia

KODE	KLASIFIKASI
471.23	Perpindahan Penduduk WNA tinggal sementara
471.3	Perpindahan Penduduk antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
471.32	Orang asing tinggal sementara
471.33	Orang asing tinggal tetap
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
472	Pencatatan Sipil
472.1	Kelahiran kematian
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.2	Perkawinan, perceraian
472.21	Perkawinan agama Islam
472.22	Perkawinan agama non Islam
472.23	Perceraian agama Islam
472.24	Perceraian agama non Islam
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta
472.31	Pengangkatan anak/Adopsi
472.32	Pengakuan anak
472.33	Pengesahan anak
472.34	Perubahan akta
472.35	Pembatalan akta
472.4	Pencatatan perubahan status perkawinan
473	PIAK dan Pemanfaatan Data
473.1	Teknologi Informasi Kependudukan
473.2	Pengolahan Data Kependudukan
473.3	Kerjasama pemanfaatan data dan inovasi
474	Perkembangan Penduduk
474.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk
474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
474.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
475	Transmigrasi
475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
475.11	Informasi potensi Penempatan Transmigrasi
475.12	Permasyarakatan/ sosialisasi transmigrasi
475.13	Peran serta pemerintah dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.14	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal
475.15	Kerjasama di urusan transmigrasi
475.16	Kepulangan transmigran
475.2	Pemukiman transmigrasi
475.21	Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi

KODE	KLASIFIKASI
475.24	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi /peta informasi pemukiman
475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /social dan jaringan transportasi
475.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
475.27	Penyelesaian masalah tanah dilokasi pemukiman transmigran
475.28	Tata ruang pemukiman transmigran
475.29	Pembinaan dan Pengendalian Sarana pemukiman transmigrasi
475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan
476	Keluarga Berencana (meliputi kebijakan dan program KB)
476.1	Pelayanan KB (termasuk pos KB, Alat Kontrasepsi, Mobil unit keliling, dll)
476.2	Pembinaan dan Penyuluhan KB termasuk Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.3	Pengembangan kader keluarga berencana dan penggerakan organisasi kemasyarakatan
476.4	Pembinaan dan Penyuluhan KB Melalui Kelompok KB : Kader KB/ PPKBD dan Institusi Masyarakat
480	MEDIA MASSA
481	Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa
481.1	Media Cetak
482	Media Elektronik
484	Kewartawanan/ Jurnalistik
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Kasus-kasus kewartawanan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawahar Wartawan Indonesia
484.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
484.7	Temu Pers/Konferensi Pers
484.8	Pers Tour
484.9	Kunjungan Wartawan Asing
485	Penyuluhan Masyarakat
486	Pembinaan bidang Informasi dan komunikasi
486.1	Training Fotografi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bimbingan teknis Informasi dan komunikasi
486.4	Rakorda Informasi dan komunikasi
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Non Pemerintah
487.11	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.2	Lembaga Pemerintah

KODE	KLASIFIKASI
487.21	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
488	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan stabilisasi
501	Pengadaan pangan
502	Pengadaan sandang
510	PERDAGANGAN
511	Promosi perdagangan
511.11	Pekan raya
511.12	Iklan
511.13	Pameran
511.14	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
512	Pemasaran
512.1	Pemasaran Lokal
512.2	Ekspor
512.3	Impor
512.4	Kemetrologian (termasuk Tera)
513	Koperasi dan UMKM
513.1	Bina Usaha Koperasi
513.11.	Permodalan Koperasi
513.12	Distribusi dan Jasa Koperasi
513.2	Bina Lembaga Koperasi
513.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
513.31	Pembinaan UMKM
513.32	Pengawasan Usaha
520	PERTANIAN (meliputi: kebijakan dan program bidang pertanian)
521	Tanaman Pangan
521.1	Produksi
521.11	Padi
521.12	Palawija
521.13	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)
521.2	Rehabilitasi lahan pertanian (Termasuk Lahan Kritis)
521.3	Perlindungan tanaman (termasuk Pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan)
522	Perikanan dan Kelautan
522.1	Produksi Perikanan
522.11	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
522.12	Perikanan Budidaya: CBIB, CBIC
522.13	Sertifikasi Kesehatan Ikan
522.2	Pengendalian hama dan penyakit
522,21	Penyakit ikan
522.22	Hama ikan
522.23	Obat-obatan termasuk sertifikasinya
522.3	Konservasi dan Suaka Laut (Termasuk Mangrove)
523	Peternakan dan Kesehatan Hewan
523.1	Produksi
523.11	Perbibitan

KODE	KLASIFIKASI
523.12	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
523.2	Kesehatan Hewan
523.21	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
523.22	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
523.23	Obat-obat Hewan
523.24	Pelayanan Kesehatan Hewan
523.3	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
523.31	Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
523.32	Hygieni dan Sanitasi
523.33	Produk Hewani
523.3	Laboratorium Kesehatan Hewan
523.31	Pengujian Mutu Asal Hewan
523.32	Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
523.33	Pengujian sampel penyakit
523.4	Inseminasi Buatan
523.41	Produksi Distribusi dan Pemasaran
523.42	Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
524	Perkebunan
524.1	Produksi
524.11	Karet
524.12	Teh
524.13	Tembakau
524.14	Tebu
524.15	Cengkeh
524.16	Kelapa/ Kopra/ Kelapa sawit
524.17	Kopi
524.18	Kakao
524.19	Jenis Tanaman yang lain
524.2	Perlindungan Tanaman
524.21	Hama
524.22	Penyakit Tanaman
524.3	Pengolahan lahan
525	Ketahanan Pangan
525.1	Pengendalian Ketersediaan dan Kerawana Pangan
525.2	Pengendalian Konsumsi Keaneragaman Pangan
526.3	Pengendalian Distribusi dan cadangan pangan
530	PERINDUSTRIAN
540	PERHUBUNGAN
541	Perhubungan Darat
541.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
541.11	Keamanan Lalu Lintas, Pemasangan perlengkapan jalan
541.12	Penyuluhan dan Evaluasi ketertiban dan keselamatan transportasi
541.2	Pengujian Kendaraan
541.21	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor
541.22	Pembinaan
541.3	Angkutan Jalan Raya
541.31	Perizinan (izin trayek, izin usaha angkutan, izin prinsip)
541.4	Terminal

KODE	KLASIFIKASI
541.5	Pengelolaan Parkir
542	Pos
542.1	Jasa Pos (Jasa Pos Elektronik)
542.2	Jasa Giro
542.3	Benda Pos/ Perangko
543	Komunikasi dan Informasi
543.1	Pelayanan Publik
543.11	Standar Pelayanan (Termasuk Standar Operasional Prosedur)
543.12	Inovasi Pelayanan
543.13	Pengaduan Pelayanan
543.14	Survei Kepuasan Masyarakat
543.2	Persandian
543.3	Statistik
544	Pariwisata dan Rekreasi
544.1	Usaha Pariwisata
544.11	Usaha Jasa Pariwisata
544.15	Wisatawan
544.151	Wisatawan Nusantara
544.152	Wisatawan Mancanegara
544.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
544.161	Dalam Negeri
544.162	Luar Negeri
550	TENAGA KERJA
551	Penempatan
551.1	Data Permintaan Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri
551.2	Rekrutmen dan Seleksi Calon Tenaga Kerja di Luar Negeri
551.3	Pemberangkatan Tenaga Kerja
551.4	Pemulangan Tenaga Kerja
551.41	Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Karena Kontraknya Habis
551.42	Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Berhadapan Hukum
551.43	Tenaga Kerja Indonesia Terkena Kasus Pidana
551.5	Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja
551.6	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
551.7	Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
551.71	Izin Pendirian Lembaga Penyaluran Tenaga Kerja
551.72	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja
551.73	Pencabutan Izin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
552	Hubungan Industrial
552.1	Kerjasama Bipartid
552.2	Kerjasama Tripartid
552.3	Serikat Pekerja/ Organisasi Pekerja
552.4	Perselisihan Hubungan Industrial
552.5	Syarat Kerja
552.6	Upah

KODE	KLASIFIKASI
552.61	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/ Nasional
552.62	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Provinsi
553	Latihan Kerja
553.1	Pendidikan Pekerja
553.2	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
555	Perselisihan Pekerja
556	Keselamatan Kerja (termasuk pertolongan pertama pada Kecelakaan kerja dan perijinan terkait keselamatan kerja)
557	Pemutusan Hubungan Kerja
557.1	Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
557.2	Pemutusan Hubungan Kerja Masal
557.3	Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja
557.5	Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja
557.7	Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja
558	Kesejahteraan pekerja
558.1	Bantuan Kredit/ Bantuan Modal kerja bagi Tenaga Kerja
558.2	Perumahan Pekerja
558.3	Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
558.4	Koperasi Pekerja
558.5	Sarana Transportasi Pekerja
558.6	Perpustakaan Pekerja
558.7	Tempat Ibadah Pekerja
558.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
559	Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
560	PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
561	Penanaman Modal
561.1	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
561.2	Penanaman Modal Asing (PMA)
561.3	Saham (Termasuk Investasi Saham Daerah)
562	Perizinan
562.1	Izin Prinsip Penanaman Modal
562.2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
562.3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
562.4	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
562.5	Izin Usaha Penanaman Modal
562.6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
562.7	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
562.8	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
562.9	Izin Mendirikan Bangunan, kecuali Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat (bukan kompleks perumahan) dengan luas sampai dengan 100m ² (seratus meter persegi)
562.10	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
562.11	Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum

KODE	KLASIFIKASI
562.12	Izin Pemakaian Tanah Pengairan, dengan luas sampai dengan 1000m ² (seribu meter persegi)
562.13	Izin Lokasi
562.14	Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
562.15	Izin Usaha Industri
562.16	Izin Perluasan Usaha Industri
562.17	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
562.18	Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI)
562.19	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
562.20	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
562.21	Izin Usaha Perdagangan
562.22	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
562.23	Tanda Daftar Gudang (TDG)
562.24	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
562.25	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan
562.26	Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan
562.27	Izin Operasional Simpan Pinjam Koperasi
562.28	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
562.29	Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet
562.30	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner
562.31	Izin Pelayanan Jasa Paramedik Veteriner
562.32	Izin Jagal Hewan
562.33	Izin Pendirian Rumah Pematangan Hewan
562.34	Izin Pendirian Rumah Pematangan Unggas
562.35	Izin Gangguan
562.36	Izin Lingkungan
562.37	Izin Pembuangan Air Limbah ke Media Lingkungan
562.38	Izin Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
562.39	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
562.40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
562.41	Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Daerah
562.42	Izin Riset, Survei, Penelitian, atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk mahasiswa
562.43	Izin Riset, Survei, atau Penelitian untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan atau Perorangan dari dalam/luar negeri
562.44	Izin Reklame berkontruksi
562.45	Izin Reklame Non Kontruksi dan Insidentil
562.46	Izin Warung Internet dan Game Net
562.47	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi
562.48	Izin Operasional Panti

KODE	KLASIFIKASI
562.49	Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang
562.50	Izin Penggunaan Sarana Umum
562.51	Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
562.52	Izin Trayek Angkutan (angkutan perdesaan)
562.53	Izin Usaha Angkutan
562.54	Izin Bongkar Muat
562.55	Izin Operasional Pendirian SD Swasta
562.56	Izin Operasional Pendirian SMP Swasta
562.57	Izin Pendirian Prasarana Olah Raga
562.58	Izin Pemakaian/Penggunaan Gelanggang Olah Raga/Stadion W.R. Soepratman
562.59	Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis)
562.60	Izin Penyelenggaraan dan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
562.61	Izin/rekomendasi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dari pihak lain
562.62	Izin Mendirikan Rumah Sakit
562.63	Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit
562.64	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
562.65	Izin Mendirikan Klinik (termasuk Klinik Kecantikan Estetika)
562.66	Izin Operasional Klinik (termasuk Klinik Kecantikan Estetika)
562.67	Izin Klinik Pelayanan Hemodialisis
562.68	Izin Penyelenggaraan Radiologi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
562.69	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) atau Unit Donor Darah
562.70	Izin Apotek
562.71	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama
562.72	Izin Penyelenggaraan Optical
562.73	Izin Toko Alat Kesehatan
562.74	Izin Toko Obat
562.75	Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
562.76	Izin Praktek Apoteker (SIPA)
562.77	Izin Praktik dan Izin Kerja Bidan (SIPB dan SIKIB)
562.78	Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat (SIPP dan SIKP)
562.79	Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG dan SIPPg)
562.80	Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA dan SIPPAn.)
562.81	Izin Tenaga Kerja Kefarmasian (SIPTK)
562.82	Izin Praktik dan Izin Kerja Fisioterapis (SIPF dan SIKF)
562.83	Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIK-ALM)

KODE	KLASIFIKASI
562.84	Izin Kerja dan Praktik Elektromedis (SIK-E dan SIPE)
562.85	Izin Kerja Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz dan SIKTGz)
562.86	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
562.87	Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)
562.88	Izin Kerja Radio Grafer (SIKR)
562.89	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris (SIKRO/ SIRO)
562.90	Izin Kerja dan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIKTKT)
562.91	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
562.92	Sertifikasi Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
562.93	Izin Usaha Menengah Obat Tradisional
570	PERBANKAN MONETER
571	Kredit
572	Investasi
573	Tabungan (termasuk deposito)
574	Bank Pembangunan Daerah (termasuk Bank Jateng, BPR, BKK, Bank Pasar)
575	Asuransi
577	Fiscal
578	Hutang Negara Obligasi
579	Moneter
580	AGRARIA
581	Tata Guna Tanah
581.1	Pemetaan dan Pengukuran
581.2	Perpetaan
581.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
581.4	Fakta Tata Guna Tanah
582	Landreform
592.1	Redistribusi dan Pendaftaran
592.2	Ganti Rugi
582.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
582.22	Ganti Rugi Tanah Absentee
582.23	Ganti Rugi Tanah Partikelir
582.3	Bagi hasil
583	Pengurusan Hak-hak Tanah
583.1	Sewa Tanah
583.2	Hak Milik
583,3	Hak Pakai
583.4	Hak Guna Usaha
583.5	Hak Guna Bangunan
583.6	Hak Pengelolaan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Instalasi
601.1	Instalasi bangunan
601.2	Instalasi listrik
601.3	Instalasi air/ sanitasi
601.4	Instalasi pengatur udara

KODE	KLASIFIKASI
601.5	Instalasi akustik
601.6	Instalasi cahaya/ penerangan
602	Konstruksi pencegahan
602.1	Konstruksi pencegahan terhadap Air
602.2	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
602.3	Terhadap gempa
602.4	Terhadap angin/ udara/ panas
602.5	Terhadap kegaduhan
602.6	Terhadap gas/ explosive
602.7	Terhadap serangga
602.8	Terhadap radiasi atom
610	PENGAIRAN
611	Irigasi dan Polder
611.1	Bangunan pengambilan
611.2	Bangunan pembawa dan salurannya
611.3	Bangunan Pembuangan dan salurannya
611.4	Bangunan Penunjang Irigasi dan Polder
612	Danau, Waduk, Sungai
612.1	Bangunan pembawa
612.11	Saluran Pembawa Induk
612.12	Saluran Pembawa Sekunder
612.13	Saluran Pembawa Tersier
612.14	Saluran Penyimpanan Air
612.15	Saluran Pintu Pembuangan
612.2	Bangunan pembuangan
612.21	Saluran Pembawa Induk
612.22	Saluran Pembawa Sekunder
612.23	Saluran Pembawa Tersier
612.24	Saluran Penyimpanan Air
612.25	Saluran Pintu Pembuangan
612.3	Bangunan lainnya
612.31	Kolom pasang
612.32	Saluran
612.321	Saluran Lalu Lintas
612.322	Saluran Muka
612.33	Bangunan
612.331	Bangunan Penangkis Kotoran
612.332	Bangunan Pengukur Muka air
612.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.34	Jalan
612.35	Jembatan
613	Pengaman Pantai
613.1	Tanggul
613.2	Krib
613.3	Bangunan lainnya
613.4	Bangunan lainnya
620	JALAN
621	Jalan Kota/ Kabupaten
621.1	Daerah Penguasaan

KODE	KLASIFIKASI
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Badan Jalan
621.3	Perkerasan
621.31	Lapisan Pondasi bawah
621.32	Lapisan Pondasi
621.33	Lapisan Permukaan
621.4	Drainage
621.41	Parit Tanah
621.42	Gorong-gorong (culvert)
621.5	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
622	Jalan Provinsi
622.1	Daerah penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.2	Badan jalan
622.21	Pekerjaan tanah (earth work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (pavement)
622.31	Lapis pondasi bawah
622.32	Lapis pondasi
622.33	Lapis permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (culvert)
622.43	Buku trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Medium
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu penerangan
622.83	Lampu Pengatur lalu lintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R,0,W (sempadan)
622.86	Rel pengamanan
622.87	Pagar

KODE	KLASIFIKASI
622.88	Turap penahan/Sepadan
622.89	Bronjong
623	Jalan Nasional
623.1	Daerah penguasaan
623.2	Badan jalan
623.3	Perkerasan (lapis pondasi,lapis permukaan)
623.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada Jalan Kabupaten/ Kota
631.1	Daerah penguasaan
631.2	Pembangunan
631.3	Pemeliharaan
632	Jembatan pada Jalan Provinsi
632.1	Daerah penguasaan
632.2	Pembangunan
632.3	Pemeliharaan
633	Jembatan pada jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan)
633.2	Pembangunan
633.3	Pemeliharaan
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Penjara
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD dan Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi (Termasuk Museum)
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Gedung Perdagangan
644.2	Bank
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Rumah sakit
645.3	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah Perdagangan/ Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perdagangan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan

KODE	KLASIFIKASI
653	Daerah Perumahan (site dan servei)
652.1	Kepadatan Rendah (low density)
652.2	Kepadatan Tinggi (high density)
653	Daerah Industri
653.1	Industri Berat
653.2	Industri Ringan
653.3	Industri Rumah (home Industry)
654	Daerah Rekreasi
654.1	Taman Umum
654.2	Taman Bermain dan Olahraga
654.3	Ruang Terbuka Umum
655	Transportasi (tata letak)
655.1	Jaringan dan penerangan jalan
655.2	Jaringan kereta api
655.3	Jaringan sungai
656	Assineering/ Penghancur Kotoran
656.1	Saluran Pengumpulan
656.2	Instansi Pengolahan
656.21	Bangunan
656.22	Bangunan Penyaring
656.23	Bangunan Penghancur Kotoran
656.24	Bangunan Pengendapan
656.25	Bangunan Pengering Lumpur
656.26	Unit Desinfektan
656.27	Unit Perpompaan
657	Kesehatan Lingkungan
657.1	Persampahan
657.11	Bangunan pengumpulan
657.12	Bangunan Pemusnahan
657.2	Pengotoran Udara
657.3	Pengotoran Air
657.31	Air Buangan Industri
657.4	Kegaduhan
657.5	Kebersihan Kota
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan Hidup (termasuk program lingkungan hidup)
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah
660.34	Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) , Limbah Beracun dan Berbahaya (LB3) dan Bahan Perusak Ozon (BPO)
660.35	Instalasi Pencemaran Air Limbah (IPAL)
660.36	Baku Mutu Lingkungan
661	Kerusakan Lingkungan
662	Konservasi Lingkungan
662.1	Konservasi Pesisir Dan Laut
662.2	Konservasi Sumber Daya Alam

KODE	KLASIFIKASI
663	Penegakan Hukum Lingkungan
664	Laboratorium Lingkungan
664.1	Air
664.2	Udara
664.3	Tanah
665	Dokumen Lingkungan dan Perizinan
665.1	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
665.2	UKL/ UPL, SPPL
665.2	Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
666	Pengembangan Teknologi Lingkungan
667	Pengembangan Kapasitas Lingkungan
700	PENGAWASAN
700.1	Kebijakan dan program pengawasan
700.2	Pengawasan perencanaan pengadaan/ proyek
701	Pengawasan Inventarisasi Asset
702	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
703	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
704	Pengawasan Penelitian/ Riset
705	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
706	Pengawasan Pertanahan/ BPN
710	BIDANG PEMERINTAH
711	Pengawasan Pemerintah Provinsi
712	Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
713	Pengawasan Pemerintah Desa
720	BIDANG POLITIK
721	Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll
722	Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/ tani dan kepemudanaan
730	BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN
731	Pengawasan Kesbangpolinmas
732	Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/ SAR
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan Kesehatan/ Makanan/ Obat
745	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
746	Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi
747	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
748	Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masyarakat
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE	KLASIFIKASI
754	Pengawasan tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
755	Pengawasan PMDN/ PMA
756	Pengawasan Perbankan/Moneter
757	Pengawasan Kelautan dan Perikanan
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
765	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Penyimpangan Pejabat Publik
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
783	Keanggotaan PNS dalam Parpol
784	Penyimpangan pejabat/ PNS
785	Persengketaan PNS
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran
792	Pengawasan Akuntansi
793	Pengawasan Perbendaharaan
794	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah termasuk Kas Desa
795	Pengawasan Pendapatan
800	KEPEGAWAIAN (termasuk: Kebijakan Kepegawaian)
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.3	Statistik
810	PENGADAAN (meliputi: lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai.
811	Pendaftaran CPNS
811.1	Seleksi
811.2	Pengumuman tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS golongan II
813.3	Pengangkatan CPNS golongan III
814	Pengangkatan Tenaga Lepas/ Honorer/ PPPK
820	MUTASI
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.14	Sumpah janji PNS

KODE	KLASIFIKASI
821.2	Pengangkatan dalam jabatan (JPT dan Administrasi), pemberhentian dari jabatan, Berita Acara Tim Penilai Kinerja
821.21	Berita Acara Serah Terima Jabatan, Sumpah Janji, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan
821.22	JPT Utama
821.23	JPT Pratama – Madya
821.24	Administrator
821.25	Pengawas
821.26	Pelaksana
821.3	Jabatan Fungsional Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, Sumpah Janji Surat Perintah Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan
821.4	Kenaikan Jabatan Penyesuaian Jabatan
821.5	Uji Kopetensi
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat
823.1	PNS Golongan I
823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III
823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
824.3	PNS Golongan III
824.4	PNS Golongan IV
824.5	Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
824.6	Penolakan Mutasi
825	Datasing/ Penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu
830	KEDUDUKAN
831	Peninjauan Masa Kerja
832	Penyesuaian Pangkat/ Gaji
832.1	PNS Golongan I
832.2	PNS Golongan II
832.3	PNS Golongan III
832.4	PNS Golongan IV
833	Penyesuaian Ijazah
834	Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar) dan Penghargaan lainnya
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
841	Tunjangan

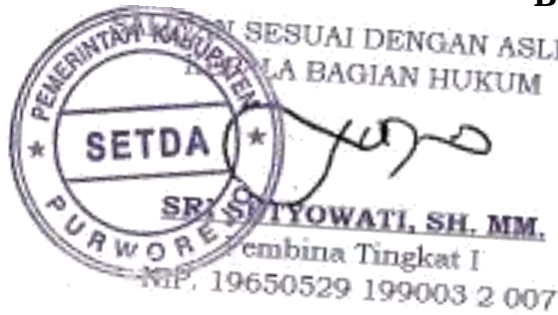
KODE	KLASIFIKASI
841.1	JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana
841.2	Tambahan Penghasilan
841.3	Tunjangan cacat
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	BPJS (Bantuan Kesehatan)
842.3	Dana Kematian (uang duka)
842.4	Penetapan Kecelakaan Kerja
842.5	Penetapan Tewas
843	Perumahan ASN
844	Dispensasi
850	CUTI
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Bersalin
855	Cuti karena Alasan penting
856	Cuti Di luar Tanggungan Negara
860	PENILAIAN
861	Penghargaan
861.1	Bintang/ Satyalencana Karya Satya
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat
861.4	Pegawai Teladan
862	Pembinaan dan Hukuman
862.1	Pembinaan
862.2	Penanganan Imdisipliner
862.3	Penanganan Perceraian
862.4	Hukuman
863	Penilaian Kinerja
863.1	JPT, Administrator, Pengawas
863.2	Fungsional
863.3	Pelaksana
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Bezetting/ Daftar Urutan Kepangkatan
872	Pengolahan data kepegawaian
872.1	NIP
872.2	KARPEG
872.3	KARSU/ KARIS
872.4	Daftar Riwayat Pekerjaan
873	Korps Kepegawaian
880	PEMBERHENTIAN
881	Atas Permintaan Sendiri, termasuk pengunduran diri
882	Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun PNS GoL I

KODE	KLASIFIKASI
882.2	Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun PNS GoL II
882.3	Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun PNS GoL III
882.4	Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun PNS GoL IV
882.5	Pensiun Janda/ Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
883	Karena Meninggal
884	Alasan lain, Misalnya keuzuran jasmani
885	Tidak Dengan Hormat
886	Dengan hormat tanpa hak pensiun
887	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
890.1	Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Diklat
891	Diklat Dasar CPNS dan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892.1	Diklatpim
892.11	Diklatpim Tk II
892.12	Diklatpim Tk III
892.13	Diklatpim Tk IV
892.2	Diklat Teknis
892.3	Diklat Fungsional
893	Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis, Ceramah, Simposium, Seminar
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Izin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Magang ASN
900	KEUANGAN
910	ANGGARAN
911	penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD
912	KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) termasuk Nota Kesepakatan
913	DPA/DPPA
914	APBN
915	APBD (termasuk nota keuangan)
920	AKUNTANSI
921	Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
922	Laporan Pengesahan pertanggungjawaban BLUD
930	PERBENDAHARAAN
931	Pencairan dana belanja langsung
932	Pencairan dana belanja tidak langsung
940	PENGELOLAAN KAS DAERAH
941	Penerimaan kas daerah

KODE	KLASIFIKASI
942	Pengeluaran kas daerah
943	Penerimaan Kas Non Anggaran (Potongan Taspen, Askes, PPh, PPn, penerimaan lainnya yang sejenis)
944	Pengeluaran Kas Non Anggaran (Penyetoran Taspen, Askes, PPh, PPn, penerimaan lainnya yang sejenis)
950	PENDAPATAN
951	Pajak bumi dan bangunan (PBB)
952	Bea perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
953	Pajak Selain PBB dan BPHTB
953.1	Pajak Parkir
953.2	Pajak Penerangan Jalan
953.3	Pajak Air Tanah
953.4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
953.5	Pajak Reklame
953.6	Pajak Hotel
953.7	Pajak Restoran
953.8	Pajak Hiburan
953.9	Pajak Sarang Burung Walet
953.10	Pajak lainnya
954	Retribusi
955	Dana Perimbangan
955.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
955.2	Dana Alokasi Umum
955.3	Dana Alokasi Khusus
956	Bea dan Cukai Selain BPHTB
957	Pungutan
958	Bantuan
958.1	Bantuan Presiden
958.2	Bantuan Menteri
958.3	Bantuan Gubernur
958.4	Bantuan Bupati
958.5	Bantuan lainnya
959	Pendapatan Lainnya
959.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
959.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
959.12	Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas
959.13	Penjualan Kendaraan Dinas
959.14	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
959.15	Penjualan Drum Bekas
959.16	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
959.2	Penerimaan Jasa Giro
959.21	Jasa Giro Kas Daerah
959.22	Jasa Giro Pemegang Kas
959.23	Jasa Giro Khusus
959.3	Penerimaan Bunga Bank
959.31	Bunga Deposito
959.32	Bunga Tabungan
959.4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian atau kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)

KODE	KLASIFIKASI
959.5	Penerimaan lain-lain
959.51	Penerimaan kembali kredit BKK
959.52	Ternak tidak layak bibit
959.53	Penerimaan dari Dana Bergulir/ Revolving
959.54	Kerjasama Dengan BUMIDA
959.55	Penerimaan DUKS
959.56	Tempat Rekreasi

BUPATI PURWOREJO,



ttd

AGUS BASTIAN